

Azas Berikan Apresiasi Pemkot

Pontianak, BERKAT.

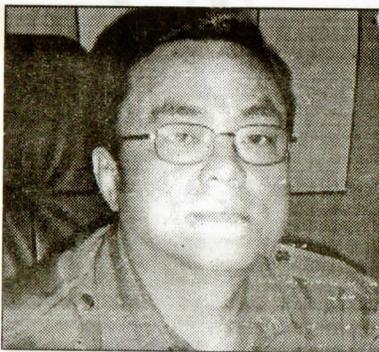
Ketua DPRD Kota Pontianak, Drs Hartono Azas L MBA memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan jajarannya, lantaran anggaran 2010 tak ada temuan, yang sifatnya kegagalan pemerintah dalam hal keuangan.

Namun ada beberapa catatan dan rekomendasi Panja Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap kepatuhan dan kepentingan keuangan yang harus diutamakan. "Terhadap beberapa rekomendasi Panja LHP, ini harus dilakukan pemkot," tegas Hartono Azas, kepada BERKAT, kemain.

Kendati rekomendasi itu sifatnya memperbaiki kinerja keuangan daerah, tertib administrasi dan pengelolaan aset serta penyertaan modal di beberapa perusahaan milik daerah, tentunya harus segera dilengkapi.

"Kalau sudah dilengkapi, kami harapkan segera diserahkan ke DPRD," tegas Azas seraya jelaskan, Panja LHP bekerja sesuai amanah Permendagri Nomor 13 tahun 2010, tentang pedoman pengembangan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Azas juga mengingatkan Walikota Pontianak agar tahun anggaran 2011, diupayakan adanya perbaikan keuangan, dengan harapan opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Ini harapan



kami," kilah politisi Partai Demokrat ini.

Terhadap jajaran di DPRD Kota Pontianak, Azas mengakui, pihaknya selalu menganut azas kehati-hatian, selalu bekoordinasi dengan Inspektorat dan BPK termasuk eksekutif.

Menurut dia, hal itu dilakukan pihaknya, agar dapat menghindari kemungkinan terjadi tindakan penyimpangan pengelolaan APBD, yang dapat menjerumus melawan hukum. "Hal-hal negatif inilah yang harus kami hindari," tegas dia.

Makanya, lanjut Azas, APBD harus terus dioptimalkan penggunaan tepat sasaran. Maksudnya, anggaran harus dialokasikan kepada kepentingan masyarakat. "Saya akan perketat pengeluaran, khususnya di DPRD, agar tak terjadi pemborosan. DPRD sebagai lembaga pengawas, tentu harus lebih baik," tegas

” Saya akan perketat pengeluaran, khususnya di DPRD, agar tak terjadi pemborosan ”

HARTONO AZAS

Ketua DPRD Kota Pontianak

Azas lagi.

Kaitan semua itu, menurut dia, DPRD yang juga sebagai lembaga pengawas akan tetap selalu mengawasi pengeluaran anggaran dinas-dinas, dan harus efektif termasuk belanja lain.

Menurut Azas, lebih baik anggaran pada dinas-dinas difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. "Program seperti ini, kami nilai menyentuh masyarakat langsung," ujar dia.

Makanya alokasi APBD kedepan, pemkot diharapkan dapat mengarahkan untuk investasi proyek air bersih semua kecamatan. Juga harus direalisasikan fery penyeberangan menghubungkan Pontianak Utara - Pontianak Barat.

"Apalagi upaya adanya fery penyeberangan sudah disampaikan dalam APBD Perubahan," tegas Azas seraya menilai, adanya fery penyeberangan, itu sebagai upaya mengantisipasi kemacetan lalu lintas di kawasan jembatan tol. (mzr)